

KAJIAN SOSIAL BUDAYA EKONOMI JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Widyaningsih Peni Lestari
Retno Anggraeni
Tasrif Kartawijaya
Prayekti Ningtias



The Nature
Conservancy 
Protecting nature. Preserving life.™

**KAJIAN SOSIAL BUDAYA EKONOMI
JEJARING KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Widyaningsih Peni Lestari
Retno Anggraeni
Tasrif Kartawijaya
Prayekti Ningtias

Sitasi:

Lestari, W.P., Anggraeni, R., Kartawijaya, T., & Ningtias, P. (2017). Kajian Sosial Budaya Ekonomi Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program

Kegiatan ini didukung oleh:



based on a decision of the German Bundestag

**MacArthur
Foundation**

EXECUTIVE SUMMARY

Socio-culture-economic study aims to observe community connection among MPAs in West Nusa Tenggara Province. Observation on population demography of the study sites shows community in all MPAs exhibit high number of similarity such as speak in Sasak and Bima language in addition to Bahasa Indonesia; almost all respondents are in productive age range; most graduated from elementary school; high dependency on marine resources; low adaptive capacity of fisher; various source of income; works as fishers for decades; more than half of fishers own their own boat; large number of fisher utilize one fishing gear; comprise of multiethnic community.

The communities live in or surround MPAs recognize regulations such as prohibited fishing practices (e.g blast fishing, poison, trawls). They aware sea turtles, dolphins, whale shark, and sea cow are protected under Indonesian Law. The communities also recognize fishing season regulation when fishers are allowed to fish and area closure for fishing activities.

Distribution of knowledge on establishment of MPAs is unequal among MPAs but in general the communities show positive support for MPA establishment. Potential conflicts, ecological threats, socio-economic threat vary among MPAs and indirectly correlate between MPA, except for blast fishing practices.

In general, practiced local knowledge at study sites are related with marine and coastal resources management such as marine festival, prohibited use of blast fishing, poison, and net. In addition to those arrangements, there are also prohibition to cut mangrove trees, coral mining, and fisher agreement on fishing regulation.

Community interaction among MPAs is mainly related with capture fisheries and tourism. Fisheries products such as grouper and snapper are commonly traded among MPAs in West Nusa Tenggara. The study identified 34 fish species are regularly traded among MPAs. The trade is mainly supported by artisanal fisheries instead of commercial fisheries.

The study found ecosystem services among MPAs occur in the form of tourism activities. While creative economic activities in the villages surround MPAs are household production and small scale industry. These activities are significantly related to tourism development.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian sosial budaya ekonomi bertujuan untuk mengetahui keterkaitan aspek sosial budaya ekonomi masyarakat di lokasi kajian. Secara demografis, masyarakat di delapan kawasan memiliki banyak kesamaan, diantaranya: menggunakan Bahasa Sasak dan Bima selain Bahasa Indonesia; hampir semua responden berada pada rentang usia produktif; sebagian besar lulus sekolah dasar; ketergantungan terhadap sumber daya laut tinggi; kapasitas adaptasi nelayan rendah; memiliki keragaman mata pencaharian; nelayan merupakan profesi yang digeluti selama puluhan tahun; lebih dari separuh nelayan memiliki perahu sendiri; sebagian besar menggunakan satu alat tangkap; dan terdiri dari masyarakat multietnis.

Peraturan mengenai alat tangkap yang dilarang seperti bom, racun, pukut hela dasar umumnya diketahui oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan. Masyarakat tahu penyu, lumba-lumba, hiu paus, dugong dilindungi. Selain itu juga ada aturan waktu, mengatur kapan nelayan tidak melaut dan aturan tentang lokasi dilarang menangkap ikan.

Sebaran pengetahuan tidak merata, secara umum dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi kajian menjadi kawasan konservasi cukup positif. Potensi konflik dan ancaman ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi bervariasi dan tidak berhubungan langsung antar KKP3K, kecuali penggunaan alat tangkap bom.

Secara umum kearifan lokal di lokasi kajian terkait sumber daya pesisir dan laut adalah upacara selamatan laut, larangan penggunaan bom, racun, dan jaring. Larangan menangkap penyu, lumba-lumba, paus, hiu, dan ikan karang. Larangan menebang pohon bakau, mengambil terumbu karang, dan adanya kesepakatan waktu dimana nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Sebagian besar interaksi masyarakat antar kawasan konservasi perairan terjadi pada sektor perikanan tangkap dan sektor pariwisata. Bentuk interaksi yang terjadi pada sektor perikanan berupa jual beli produk perikanan seperti ikan kakap dan kerapu. Terdapat 34 jenis ikan yang dimanfaatkan. Sebagian besar armada masuk dalam kategori nelayan skala kecil.

Jasa ekosistem yang teridentifikasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan antar KKP3K adalah jasa ekosistem kesenangan (pariwisata). Sektor industri yang umumnya dijumpai di wilayah pedesaan adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Salah satu usaha jasa yang paling menonjol adalah pariwisata.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metodologi	2
1.4. Lokasi Kajian	3
2. PEMBAHASAN	4
2.1 Profil Demografi Kawasan Konservasi Perairan (KKP3K)	4
2.2 Aspek Sosial Budaya	6
2.2.1 Pengetahuan tentang Aturan Pengelolaan KKP3K	6
2.2.2 Dukungan Masyarakat terhadap KKP3K	8
2.2.3 Potensi Konflik Kepentingan dan Ancaman	10
2.2.4 Kearifan Lokal dan Adat Istiadat	13
2.3 Aspek Sosial Ekonomi	14
2.3.1 Interaksi Ekonomi Masyarakat Antar KKP3K	14
2.3.2 Jenis Sumber Daya Ikan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Antar KKP3K	17
2.3.3 Jenis Jasa Lingkungan yang Dimanfaatkan oleh Pihak yang Berkepentingan Antar KKP3K	20
2.3.4 Jenis Kegiatan Produktif yang Dilakukan di dalam Kawasan yang Berjejaring	22
3. KESIMPULAN	23
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi kajian sosial budaya ekonomi	3
Tabel 2. Profil demografi delapan KKP3K	5
Tabel 3. Potensi ancaman di lokasi kajian	12
Tabel 4. Bentuk interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi.....	14
Tabel 5. Jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	18
Tabel 6. Kegiatan produktif di lokasi kajian	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi etnis masyarakat di sekitar KKP3K Pulau Lombok	4
Gambar 2. Komposisi etnis masyarakat di sekitar KKP3K Pulau Sumbawa	6
Gambar 3. Sebaran pengetahuan masyarakat mengenai aturan pengelolaan KKP3K.....	7
Gambar 4. Tingkat dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi kajian sebagai KKP3K	8
Gambar 5. Manfaat zonasi KKP3K bagi sumber daya laut.....	9
Gambar 6. Manfaat zonasi KKP3K bagi masyarakat.....	9
Gambar 7. Sebaran tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan tipe pengelolaan pesisir	10
Gambar 8. Rute perdagangan kakap kerapu Pulau Lombok dan Sumbawa	16
Gambar 10. Peta pengembangan pembangunan ekonomi Bali – Nusa Tenggara	21

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) didefinisikan sebagai kerja sama pengelolaan dua atau lebih KKP3K secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik, sosial-budaya-ekonomi, dan/atau tata kelola. Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan sinergi pengelolaan KKP3K agar lebih efektif, efisien, dan komprehensif dibandingkan dengan pengelolaan KKP3K yang dilakukan secara individual. Jejaring KKP3K dapat memberikan nilai tambah lebih dibandingkan KKP3K yang dikelola secara individual karena jejaring (a) melindungi sumber daya, ekosistem dan habitat secara terpadu, serta (b) mendorong pembagian kapasitas dan pengelolaan yang merata (Dit. KKJI, 2013).

Ada tiga alasan utama mengapa kawasan-kawasan konservasi perlu berjejaring yaitu: (a) alasan ekologis, (b) alasan sosial-budaya-ekonomi, dan (c) alasan tata kelola (IUCN-WCPA, 2008; UNEP-WCMC, 2008 dalam Dit. KKJI, 2013). Dari segi ekologis, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sebuah ekosistem laut tidak berdiri sendiri tanpa terhubung dengan ekosistem yang lain. Kesehatan terumbu karang tergantung pada kesehatan mangrove dan padang lamun di sekitarnya, begitu juga sebaliknya. Dari segi sosial, banyak penduduk pesisir yang memiliki ikatan sosial budaya yang tinggi dengan desa atau daerah tetangga. Jika beberapa kawasan pesisir di tempat tersebut dijadikan KKP3K yang dikelola secara lokal, adalah wajar jika para pengelola kawasan bergabung dalam satu jejaring karena kedekatan sosial budaya mereka (CTI-CFF, 2013 dalam Dit. KKJI, 2013). Dari segi ekonomi, KKP3K dapat menghemat dan mengefisienkan biaya pelaksanaan program tertentu dalam pengelolaan kawasan dengan bekerja sama dalam suatu jejaring. Dari segi tata kelola, dengan memperhatikan otonomi daerah, kebijakan pembentukan jejaring dalam satu provinsi akan lebih mudah diimplementasikan mengingat adanya kewenangan pemerintah provinsi dalam penyusunan kebijakan, program dan anggaran terhadap kabupaten/kota di bawahnya (Dit. KKJI, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional, selain berdasarkan keterkaitan biofisik dapat

ditambah dengan memperhatikan keterkaitan aspek tata kelola, dan/atau aspek sosial-budaya-ekonomi.

Aspek keterkaitan sosial-budaya terdiri dari: (1) dukungan masyarakat, (2) potensi konflik kepentingan, (3) potensi ancaman, (4) kearifan lokal, dan (5) adat istiadat. Sedangkan aspek ekonomi terdiri dari: (1) interaksi ekonomi masyarakat antar kawasan konservasi perairan, (2) jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat antar kawasan konservasi perairan, (3) jenis jasa lingkungan yang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan antar kawasan konservasi perairan, dan (4) jenis kegiatan produktif yang dilakukan di dalam kawasan yang berjejaring (Dit. KKJI, 2013).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki luas wilayah perairan laut mencapai 29.159,04 km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.333 km (BPS NTB, 2013) dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Di wilayah Provinsi NTB terdapat duabelas kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengelola tiga kawasan konservasi dengan luasan 11.100,3 hektar dan Pemerintah Provinsi NTB mengelola sembilan kawasan konservasi dengan luasan 229.555,36 hektar yang tersebar di 7 kabupaten yang dikelola oleh 3 unit pelaksana teknis daerah Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Luasan tersebut menyumbang sekitar 1,39% dari luasan kawasan konservasi perairan nasional dan 7,87% dari luas perairan NTB (Aminollah et al., 2016). Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di NTB, penting untuk memperkuat kerjasama antar pengelola kawasan sehingga dibutuhkan kajian aspek sosial budaya dan ekonomi dalam pembentukan jejaring kawasan konservasi di NTB.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Mengetahui keterkaitan aspek sosial budaya masyarakat di lokasi kajian
2. Mengetahui keterkaitan aspek ekonomi masyarakat di lokasi kajian

1.3. Metodologi

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah laporan sosial ekonomi yang disusun oleh WCS-IP dan publikasi lain yang berkaitan dengan aspek sosial-budaya-ekonomi di lokasi kajian.

Masyarakat pesisir yang menjadi responden dari kajian sosial ekonomi yang telah dibuat adalah nelayan (tangkap dan budidaya), pekerja wisata yang beraktivitas di lokasi kajian, dan masyarakat yang tinggal di sekitar KKP3K.

1.4. Lokasi Kajian

Kajian keterkaitan aspek sosial-budaya-ekonomi dilakukan di duabelas KKP3K yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi NTB seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi kajian sosial budaya ekonomi

No	Nama Kawasan	Wilayah Administrasi	
		Kecamatan	Kabupaten
1	Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra	Pemenang	Lombok Utara
2	TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sudak	Sekotong	Lombok Barat
3	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	Sambelia dan Pringgabaya	Lombok Timur
4	TWP Teluk Bumbang	Pujut	Lombok Tengah, Lombok Timur
5	Taman Pesisir (TP) Penyu Lunyuk	Lunyuk dan Labangka	Sumbawa
6	TWP Gili Banta	Lambu dan Sape	Bima
7	TWP Liang dan Ngali	Lape, Moronge, Moyo Hilir, dan Moyo Utara	Sumbawa
8	Suaka Alam Perairan (SAP) Teluk Cempi	Dompu, Hu'u, Kempo, Pajo, Tarano, dan Woja	Dompu dan Sumbawa
9	Taman Pulau Kecil (TPK) Kramat Bedil Temudong (KBT)	Utah	Sumbawa
10	TPK Gili Balu Poto Tano	Poto Tano	Sumbawa Barat
11	Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Satonda	Pekat	Dompu
12	Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Moyo	Labuhan Badas	Sumbawa

Sumber: WCS-IP Marine Program, 2017

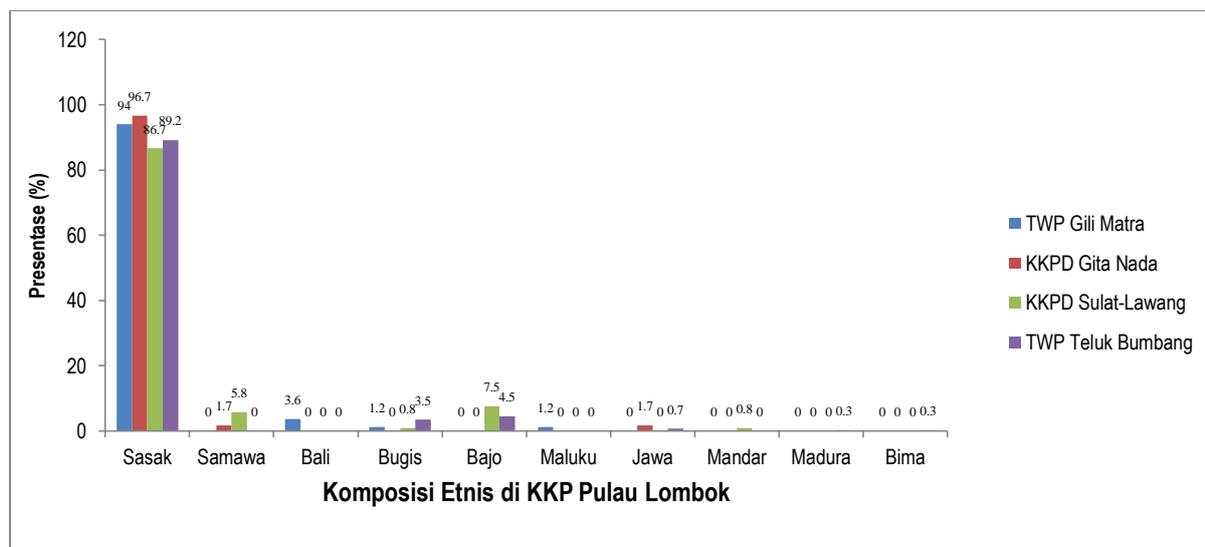
Walaupun ada duabelas KKP3K yang menjadi lokasi kajian, kajian ini akan banyak membahas delapan KKP3K saja karena keterbatasan data sosial ekonomi yang ada. Laporan sosial ekonomi yang disusun oleh WCS-IP hanya mencakup delapan KKP3K yaitu: TWP Gili Matra, TWP Gita Nada, TWP Sulat Lawang, TWP Teluk Bumbang, TWP Liang Ngali, TWP Gili Banta, SAP Teluk Cempi, dan TP Penyu Lunyuk. Data dianalisa secara deskriptif.

2. PEMBAHASAN

2.1 Profil Demografi Kawasan Konservasi Perairan (KKP3K)

Secara umum profil demografi di delapan kawasan memiliki banyak kesamaan, diantaranya: (1) Bahasa yang digunakan selain Bahasa Indonesia adalah Bahasa Sasak dan Bima; (2) Hampir semua responden berada pada rentang usia produktif; (3) Sebagian besar lulus Sekolah Dasar; (4) Ketergantungan terhadap sumber daya laut tinggi; (5) Kapasitas adaptasi nelayan rendah; (6) Memiliki keragaman mata pencaharian; (7) Nelayan merupakan profesi yang digeluti selama puluhan tahun; (8) Lebih dari separuh nelayan memiliki perahu sendiri; (9) Sebagian besar menggunakan satu alat tangkap; dan (10) terdiri dari masyarakat multietnis. Informasi detail di setiap KKP3K dapat dilihat pada Tabel 2.

Di Pulau Lombok, Sasak adalah suku yang dominan, sedangkan di Pulau Sumbawa etnis Bima lebih banyak ditemui, dan di hampir semua KKP3K ada etnis Bugis. Selain ketiga suku ini ada etnis Bali, Samawa, Bajo, Bugis, Jawa, Mandar, dan Madura. Masyarakat kategori pendatang ini pada umumnya telah berada di lokasi kajian ≥ 10 tahun. Di TP Penyu Lunyuk, etnis mayoritas adalah Suku Bali (>50%). Hal ini dikarenakan pada tahun 1990-an Kecamatan Lunyuk dijadikan daerah transmigrasi oleh pemerintah (Kartawijaya, et al., 2014a). Komposisi etnis di setiap KKP3K disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



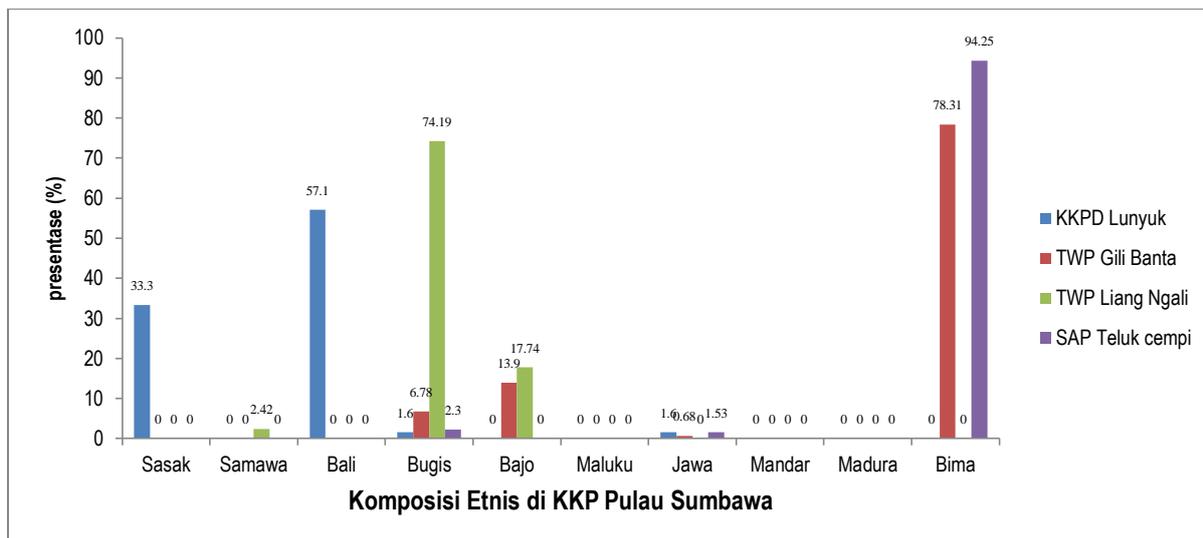
Gambar 1 . Komposisi etnis masyarakat di sekitar KKP3K Pulau Lombok

Tabel 2. Profil demografi delapan KKP3K

No	Indikator	Gili Matra	Gita Nada	Gili Sulat Lawang	Teluk Bumbang	Lunyuk	Liang Ngali	Teluk Cempi	Gili Banta
1	Lokasi survei sosio-ekonomi (jumlah desa yang disurvei)	1	5	4	5	5	6	13	8
2	Jumlah responden	142	120	120	285	121	128	259	294
3	Komposisi etnis	Sasak, Bali, Bugis, Mandar, Ambon	Sasak, Jawa, Sumbawa	Sasak, Bajo, Bugis, Mandar	Sasak, Bajo, Bugis	Sasak, Bali, Bima, Jawa, Sumbawa	Bugis, Bajo, Sasak	Bima, Bugis, Flores, Sumbawa	Bima, Bajo, Bugis, Jawa
4	Bahasa sehari-hari (selain Bahasa Indonesia)	Sasak	Sasak	Sasak, Sumbawa	Sasak	Sasak	Bugis, Sumbawa	Bima	Bugis, Bajo, Mbojo, Bima
5	Ukuran RT (mean)	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	4,5	4,5
6	Lulusan sekolah dasar	74%	n/a	48,3%	69,5%	66,5%	83,85%	64,37%	71,86%
7	Usia produktif (18-64 tahun)	n/a	99,16%	86,7%	96,14%	100%	94,62%	93,87%	97,63%
8	Kesejahteraan berdasarkan kepemilikan aset (mean)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,000000000 692308	0,000000000 0692308	-0,000000000 00915254
9	Pendapatan – Rupiah (mean)	1.545.845	1.179.483	1.253.849	n/a	3.618.290	2.867.307	4.244.463	4.628.814
10	Pengeluaran – Rupiah (mean)	n/a	944.594	1.163.033	n/a	n/a	1.829.846	2.734.100	2.654.878
11	Infrastruktur komunitas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16,67	17,23	16
12	Ketergantungan terhadap perikanan (skala 0 – 1)	0,36	0,54	0,85	n/a	0,63	0,97	0,99	0,99
13	Kapasitas adaptasi (nelayan)	0,09	0,28	0,1	0,09	0,35	0,23	0,33	0,72
14	Keragaman mata pencaharian RT (skala 1 – 2)	1,68	1,51	1,43	n/a	1,67	1,77	1,78	1,34
15	Lama jadi nelayan (tahun)	27	18	25	n/a	17	25,20	21,34	21,33
16	Kepemilikan perahu	53,5%	94,2%	74,20%	82,4%	85,90%	86,15%	81,23%	68,80%
17	Keragaman alat tangkap	n/a	1,63	1,45	1,54	1,41	1,25	1,16	1,17

Sumber: Yulianto et al., 2017; Lestari et al., 2016a; Lestari et al., 2016b; Kartawijaya, et al., 2014a; Kartawijaya, et al., 2014b; Kartawijaya et al., 2014c; Kartawijaya, et al., 2013; Kartawijaya, et al., 2012.

n/a: Data tidak tersedia



Gambar 2. Komposisi etnis masyarakat di sekitar KKP3K Pulau Sumbawa

Bahasa yang digunakan sehari-hari di lokasi kajian adalah Bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah yang paling banyak digunakan masyarakat di lokasi kajian adalah Bahasa Sasak dan Bima. Bahasa Sasak menjadi bahasa yang banyak digunakan (bahasa pergaulan) oleh masyarakat di Pulau Lombok, baik itu oleh etnis Sasak maupun non Sasak.

Bahasa Bima banyak digunakan oleh masyarakat pesisir di lokasi TWP Gili Banta, TWP Liang Ngali, dan SAP Teluk Cempi walaupun bukan berasal dari Suku Bima. Bahasa Bima sendiri terdiri atas berbagai dialek, yaitu dialek Bima, Bima Donggo, dan Siangi. Adanya ketiga dialek tersebut menunjukkan tingkatan atau tinggi rendahnya Bahasa Bima yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam berkomunikasi sebagai wujud nilai kesopanan. Bahasa yang dipakai oleh Suku Bima ini termasuk bahasa yang digunakan oleh kelompok Melayu Polinesia (Ini dia 7 unsur kebudayaan masyarakat Bima, 2017). Agama mayoritas yang dianut masyarakat pesisir di lokasi kajian adalah agama Islam (>98%). Selain penganut Islam, terdapat pula masyarakat yang menganut agama Kristen, Hindu dan Budha.

2.2 Aspek Sosial Budaya

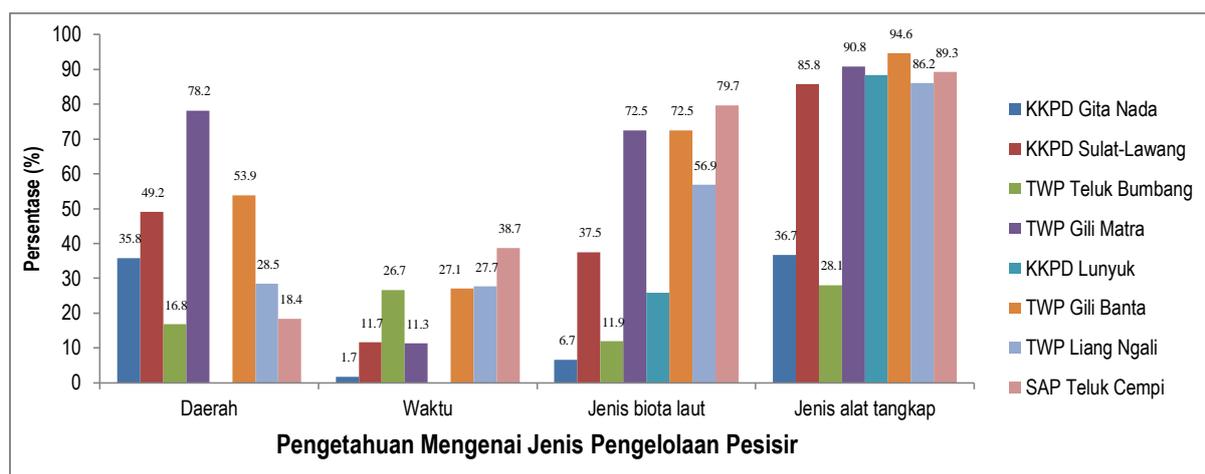
Sebelum menguraikan dukungan masyarakat terhadap KKP3K, terlebih dahulu akan dibahas pengetahuan masyarakat tentang KKP3K dan aturan pengelolaan yang ada di dalamnya.

2.2.1 Pengetahuan tentang Aturan Pengelolaan KKP3K

Aturan pengelolaan KKP3K mengatur mengenai lokasi/zonasi (zona inti, penyangga, pemanfaatan, dll), alat tangkap yang boleh digunakan, waktu, dan spesies yang boleh ditangkap atau tidak. Secara umum pengetahuan masyarakat mengenai aturan pengelolaan yang ada di dalam

KKP3K cukup baik. Pertukaran pengetahuan merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan yang dirancang untuk merangsang proses belajar dan adaptasi guna menghadapi perubahan dan ketidakpastian (Armitage et al., 2012 dalam Alexander & Armitage, 2015).

Sebagian besar masyarakat, baik itu nelayan maupun pekerja wisata, mengenali aturan mengenai alat tangkap yang tidak boleh digunakan, spesies yang dilindungi, dan lokasi dilarang menangkap ikan di lokasi kajian. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat yang mengetahui aturan tentang waktu tertentu dimana masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar pesisir seperti menangkap ikan. Latar belakang pembentukan aturan ini lebih kepada norma sosial. Gambar 3 menggambarkan sebaran tingkat pengetahuan mengenai aturan pengelolaan di delapan KKP3K.

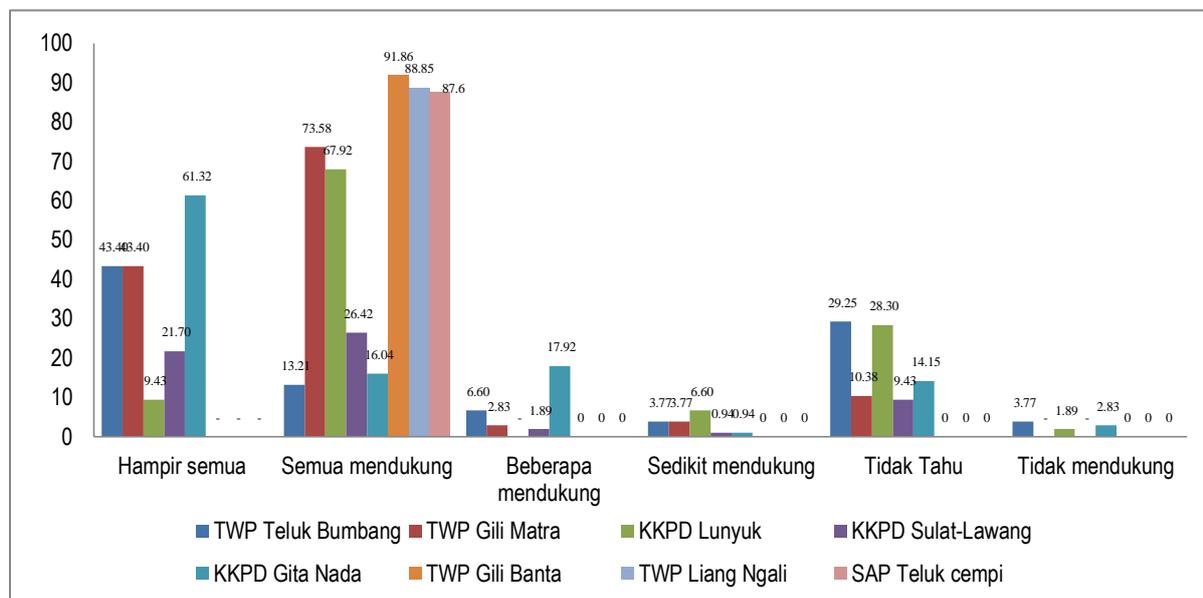


Gambar 3. Sebaran pengetahuan masyarakat mengenai aturan pengelolaan KKP3K

Peraturan mengenai alat tangkap yang dilarang seperti bom, racun, pukot hela dasar, dll umumnya diketahui oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Mengenai spesies yang dilindungi, masyarakat mengenali penyu, lumba-lumba, hiu paus, dugong sebagai satwa yang dilarang ditangkap. Aturan terkait waktu, mengatur kapan nelayan (disarankan) tidak melaut, umumnya dilakukan pada selamatan laut/carakan laut/labuhan laut, Hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ketika ada tetangga meninggal atau menikah, dll. Sedangkan tentang lokasi dilarang menangkap ikan, masyarakat menyebutkan beragam respon, mulai dari lokasi di sekitar pabrik mutiara, resort/tempat wisata, taman nasional pulau komodo, zona inti, dll.

2.2.2 Dukungan Masyarakat terhadap KKP3K

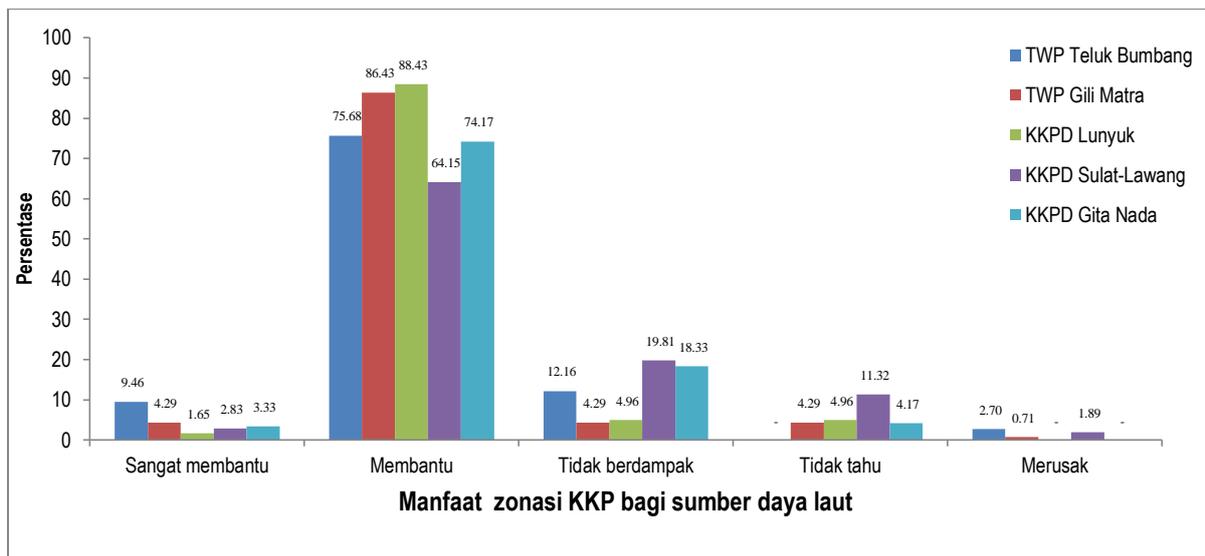
Walaupun sebaran pengetahuan tidak merata, secara umum dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi kajian menjadi kawasan konservasi cukup positif (Gambar 4). Hal ini terlihat dari persentase tingkat dukungan yang berada di atas 50% di setiap lokasi kajian.



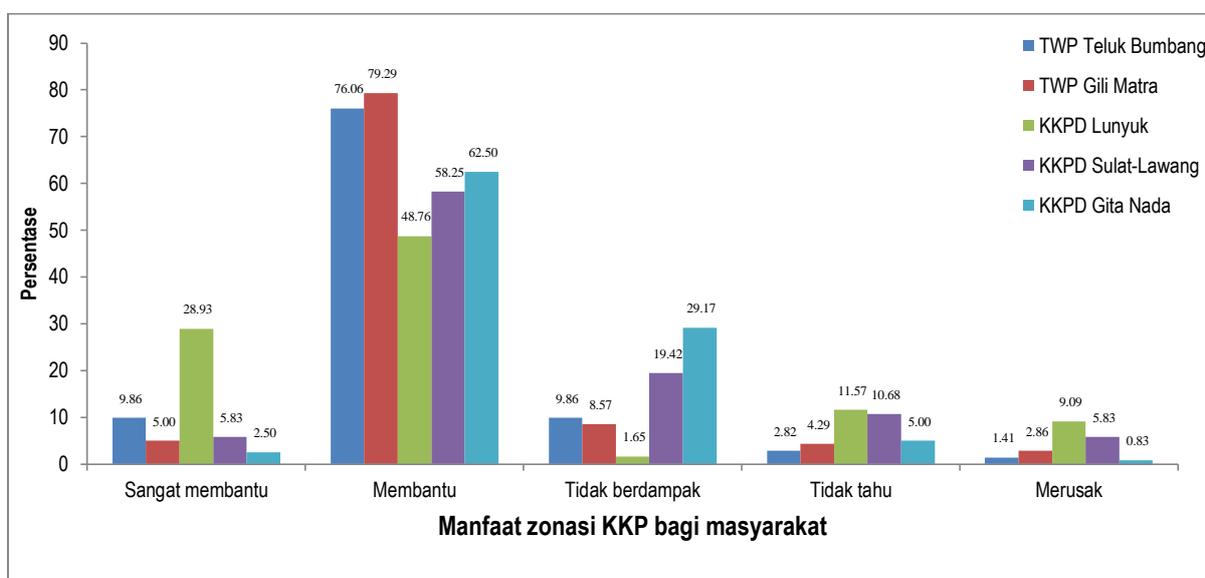
Gambar 4. Tingkat dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi kajian sebagai KKP3K

Berikut beberapa alasan yang diungkapkan oleh masyarakat mengapa mereka mendukung keberadaan KKP3K: (1) Mengurangi praktek penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, racun, pukat hela dasar, jaring krakat dan sleret; (2) Membantu kondisi sumber daya laut; (3) Meningkatkan hasil tangkapan; (4) Menjaga kestabilan pasokan ikan; (5) Melestarikan terumbu karang, bakau, lumba-lumba, penyu, hiu paus, dll; (6) Membantu perekonomian warga; dan (7) Mengembangkan wisata bahari.

Salah satu aturan dalam KKP3K adalah penetapan zonasi. Aturan tersebut dinilai memberikan manfaat yang positif baik terhadap sumber daya laut maupun terhadap masyarakat sekitar (Gambar 5 dan Gambar 6). Zonasi dinilai dapat menjaga kelestarian terumbu karang, ketersediaan stok sumber daya ikan seperti bibit lobster, mengurangi aktivitas nelayan pengebom, racun, jaring (muroami, krakat, sleret), dan membatasi aktivitas nelayan yang menggunakan kapal di atas 5 GT. Walaupun ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa pengaturan zonasi membatasi *fishing ground* mereka dan menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang.



Gambar 5. Manfaat zonasi KKP3K bagi sumber daya laut

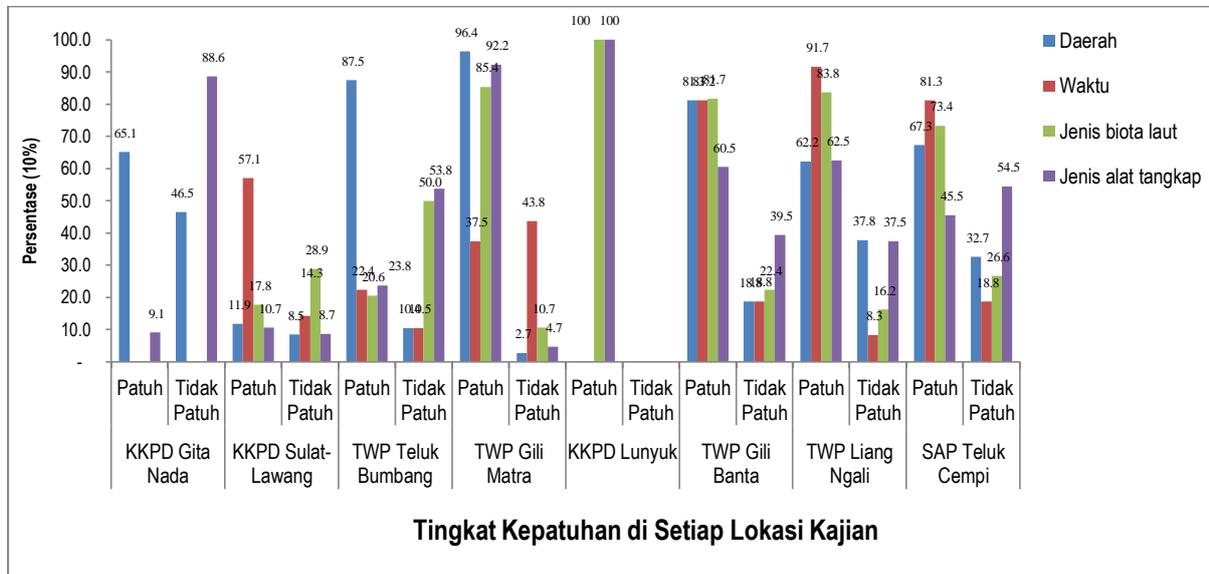


Gambar 6. Manfaat zonasi KKP3K bagi masyarakat

Dukungan terhadap pengelolaan KKP3K dijelaskan melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan yang ada. Tingkat kepatuhan bervariasi mulai dari masih terdapat orang yang melanggar hingga tidak terjadi pelanggaran. Variasi jawaban ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurang meratanya informasi pengelolaan yang diterima masyarakat, kebutuhan ekonomi yang mendesak, belum adanya tanda-tanda peringatan, dan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah terkait program.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan zonasi/lokasi dilarang menangkap ikan tinggi untuk TWP Gita Nada, TWP Sulat Lawang, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Matra, TWP Gili Banta, TWP

Liang Ngali, dan SAP Teluk Cempi. Praktek penangkapan biota laut yang dilindungi masih banyak terjadi di KKP3K Sulat Lawang dan TWP Teluk Bumbang. Penggunaan alat tangkap yang merusak juga masih banyak terjadi di TWP Teluk Bumbang. Sebaran tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan tipe pengelolaan pesisir di setiap lokasi kajian tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Sebaran tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan tipe pengelolaan pesisir

Secara umum, aturan yang masih sering dilanggar adalah penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun. Menurut masyarakat pelanggaran ini paling sering dilakukan oleh nelayan yang berasal dari luar kawasan, walaupun ada juga nelayan dari dalam dan sekitar kawasan yang melakukan pelanggaran.

2.2.3 Potensi Konflik Kepentingan dan Ancaman

Selain memiliki potensi menjadi aset untuk membantu pengelolaan KKP3K, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lokasi kajian juga memiliki potensi untuk terlibat dalam konflik. Pada dasarnya terdapat hubungan antara posisi sosial dengan kepentingan. Beberapa contoh posisi sosial pemangku kepentingan individu misalnya tokoh agama, tokoh pemuda, dan penyuluh perikanan. Sementara pemangku kepentingan institusi dapat diklasifikasikan menjadi institusi negara/pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi lokal tradisional, dan institusi swasta/bisnis. Posisi sosial yang dimiliki setiap pemangku kepentingan akan membawa konsekuensi adanya peran sesuai posisinya tersebut dan setiap pemangku mempunyai kepentingan untuk mewujudkan perannya.

Potensi ancaman dikategorikan menggunakan pendekatan analisis resiko yang dikemukakan oleh Standards Association of Australia.

Resiko dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) *Extreme risk*, pengelolaan resiko perlu ditangani segera; (2) *High risk*, pengelolaan resiko memerlukan perhatian pihak pengelola; (3) *Moderate risk*; pengelolaan resiko mengharuskan adanya peningkatan dalam pembagian tanggung jawab manajemen; (4) *Low risk*, pengelolaan resiko seperti SOP yang ada sekarang (Standards Association of Australia, 1999).

Secara umum potensi ancaman yang terdapat di lokasi kajian dari aspek ekologi berupa: (1) praktek perikanan tangkap yang merusak karena menggunakan bom, racun, jaring yang merusak, dan panah/kompresor, (2) limbah padat dan cair dari aktivitas masyarakat pesisir, (3) kegiatan wisata bahari yang belum menerapkan konsep ekowisata, dan (4) pemanfaatan sumber daya pesisir yang dilindungi. Ancaman dari aspek sosial ekonomi berupa: (1) terbatasnya kapasitas nelayan; (2) monopoli harga; (3) kuatnya hubungan *patron-client* menyebabkan nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sedangkan ancaman aspek sosial budaya akan lebih kental di KKP3K yang kegiatan wisatanya berkembang pesat, seperti di TWP Gili Matra. Ancaman tersebut berupa: (1) perubahan norma sosial; (2) kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Potensi konflik yang umum terjadi adalah konflik alat tangkap. Misalnya di TWP Liang Ngali, SAP Teluk Cempi, dan TWP Gili Banta, masyarakat sering mengeluhkan nelayan dari luar yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Di TWP Liang Ngali, selain bom praktek penggunaan racun yang dikombinasikan dengan kompresor juga dikeluhkan oleh masyarakat. Konflik alat tangkap ini juga dapat ditemukan di KKPD Sulat Lawang. Selain bom dan racun, bagan perahu juga menjadi salah satu alat tangkap yang menimbulkan konflik antara nelayan pencari udang dan nelayan bagan perahu di SAP Teluk Cempi

Contoh konflik akses dapat ditemukan di TWP Gita Nada, dimana terjadi perebutan *fishing ground* dengan nelayan dari Bali dan NTB. Nelayan lokal cenderung mengalah sehingga tidak selalu terjadi konflik (Kartawijaya, et al., 2014c). Contoh konflik pemanfaatan sumber daya alam yang dilindungi dapat ditemukan di Gili Matra, dimana jumlah wisatawan yang melakukan snorkeling dan menginjak terumbu karang masih ditemui walaupun sudah diatur dalam *awig-awig* desa. Sedangkan di TP Lunyuk, masih terdapat masyarakat pesisir yang memanfaatkan telur penyu untuk dikonsumsi atau dijual ke pasar. Selain itu pari manta dan hiu juga masih dimanfaatkan (Kartawijaya et al., 2014a). Potensi ancaman yang teridentifikasi dari lokasi kajian ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Potensi ancaman di lokasi kajian

No	Potensi Ancaman	Resiko							
		Gili Matra	Gita Nada	Gili Sulat Lawang	Teluk Bumbang	Lunyuk	Liang Ngali	Teluk Cempi	Gili Banta
1	Akses	-	High	-	-	-	-	-	-
2	Alat tangkap	-	-	-	-	-	High	High	-
3	Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan	-	-	Extreme	-	High	Extreme	Extreme	Extreme
4	Pemanfaatan sumber daya laut yang dilindungi	-	-	-	Moderate	High	-	-	-
5	Terumbu karang	Extreme	-	-	-	-	-	-	-
6	Penebangan bakau	-	-	-	-	-	-	Low	-
7	Limbah padat dan cair	Extreme	Moderate	-	-	Moderate	-	-	-
8	Pemanfaatan sumber daya laut yang dilindungi	-	-	-	-	High	-	-	-
9	Perikanan tangkap	-	Low	High	-	High	Extreme	-	-
10	Tambang emas tradisional	-	Extreme	-	-	-	-	-	-
11	Pariwisata	Extreme	Low	-	-	-	-	-	-
12	Ketimpangan ekonomi penduduk asli dan pendatang	High	-	-	-	-	-	-	-
13	Monopoli harga ikan	-	-	-	-	-	Moderate	Moderate	Moderate
14	Hubungan patron client	-	-	-	-	-	Extreme	Extreme	-
15	Perubahan norma sosial	High	-	-	-	-	-	-	-
16	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KKP3K	High	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Yulianto et al., 2017; Lestari et al., 2016a; Lestari et al., 2016b; Kartawijaya, et al., 2014a; Kartawijaya, et al., 2014b; Kartawijaya et al., 2014c; Kartawijaya, Ningtias, Herdiana et al., 2013; Kartawijaya, Yulianto, Herdiana et al., 2012.

2.2.4 Kearifan Lokal dan Adat Istiadat

Secara umum kearifan lokal di lokasi kajian terkait sumber daya pesisir dan laut adalah upacara selamatan laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, racun, dan jaring, larangan menangkap beberapa jenis biota laut yang dilindungi seperti penyu, lumba-lumba, paus, hiu, dan ikan karang, larangan menebang pohon mangrove, mengambil terumbu karang, dan adanya kesepakatan waktu khusus dimana nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Petik laut atau selamatan laut atau syukuran laut atau carak labuhan identik dengan keberadaan Suku Bajo yang tinggal di kawasan pesisir. Praktek ini masih bisa ditemui sampai saat ini di TP Lunyuk, TWP Liang Ngali, TWP Gili Banta, dan SAP Teluk Cempi. Kegiatan ini dilakukan setelah lebaran haji atau pada awal tahun baru Islam (Bulan Muharram) setiap tahunnya. Acara berlangsung selama tiga hari, dengan rangkaian kegiatan berupa acara pengajian dan melarung makanan ke laut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dan tidak ada bencana yang melanda. Dana berasal dari sumbangan pemerintah kecamatan, desa, dan penduduk sekitar.

Aturan lokal berupa penggunaan alat tangkap terdapat di seluruh lokasi studi, yaitu berupa larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, racun, dan jarring seret/krakat/muroami dan penyeragaman alat tangkap berupa pancing yang diterapkan oleh nelayan di TP Lunyuk, KKP3KD Sulat Lawang, TWP Gili Matra, TWP Gita Nada, TWP Liang Ngali, TWP Gili Banta, dan SAP Teluk Cempi. Selain itu juga terdapat aturan berupa larangan menangkap biota laut yang dilindungi seperti penyu, lumba-lumba, dugong, paus, dan kima. Di TWP Gili Banta, terutama di Kecamatan Lambu ada aturan untuk tidak makan bengkolo (ekor kuning). Menurut penuturan masyarakat hal ini dilakukan karena mengikuti sumpah dari nenek moyang. Namun saat ini praktek ini sudah jarang ditemui.

Aturan terkait larangan melaut di waktu-waktu tertentu dapat ditemukan di TWP Liang Ngali, TWP Gili Banta, dan SAP Teluk Cempi, dimana nelayan tidak melaut yaitu pada saat Carak Labuhan selama 3-7 hari, Bulan Muharam, adat desa selama 1 hari, Hari Jumat, dan Idul Fitri.

Terkait dengan akses, di TWP Sulat Lawang, ada *awig-awig* desa yang melarang penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun. Selain itu ada pembagian area untuk nelayan dengan alat tangkap tradisional. Nelayan luar dilarang masuk ke *fishing ground* desa. Hal ini dicantumkan dalam *awig-awig* Desa Sugihan, dimana nelayan Sumbawa dilarang menangkap ikan di Desa Sugihan.

Aturan terkait akses juga bisa ditemui di TWP Gili Matra. Ada *awig-awig* yang mengatur pembagian waktu untuk mengakses lokasi tertentu antara nelayan dan pariwisata. *Awig-awig* selain mengatur sumber daya laut juga mengatur beberapa perilaku yang diharapkan dilakukan oleh penduduk atau wisatawan di darat. Seperti dilarang menggunakan bikini di sekitar permukiman warga,

merusak/mengambil terumbu karang, mengotori pantai, menggunakan narkoba pada saat berwisata, dan mengganggu wisatawan.

Kearifan lokal berikutnya adalah larangan menebang bakau yang bisa ditemukan di TWP Gita Nada yaitu di Desa Batu Putih dan Gili Gede Indah. Apabila melanggar aturan ini, dendanya Rp500.000 per pohon. Terkait alat tangkap, ada larangan menggunakan jaring krakat, denda Rp500.000. Selain jaring krakat, bom dan racun juga dilarang. Mencabut lamun di pesisir dan mengambil kayu bakau juga tidak diperbolehkan.

2.3 Aspek Sosial Ekonomi

2.3.1 Interaksi Ekonomi Masyarakat Antar KKP3K

Definisi interaksi ekonomi masyarakat dalam kajian ini adalah hubungan antar pelaku (orang perseorangan, orang dengan kelompok, dan antar kelompok) dalam kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen (perusahaan), pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Model hubungan antar pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: (1) model kegiatan ekonomi sederhana (dua sektor), (2) model kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah (tiga sektor), dan (3) model kegiatan ekonomi terbuka (empat sektor). Dalam perekonomian, keempat pelaku ini memiliki hubungan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masing-masing (Tabel 4).

:

Tabel 4. Bentuk interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi

Interaksi antar pelaku	Rumah tangga keluarga	Perusahaan	Pemerintah	Luar negeri
Rumah tangga keluarga		- Membeli barang atau jasa - Mendapatkan penghasilan	- Membayar pajak - Menerima penghasilan - Mendapatkan fasilitas publik	- Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa - Mengekspor sumber daya
Perusahaan	- Menghasilkan barang atau jasa - Memberikan keuntungan dan penghasilan		- Membayar pajak - Menjual hasil produksi	- Melakukan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa

Pemerintah	- Memberikan jasa pelayanan, Pembangunan, fasilitas publik	- Menerima pajak - Membeli produk		- Menerima pajak - Penerimaan devisa - Kebijakan ekspor dan impor
Masyarakat luar negeri	- Menyediakan barang atau jasa	- Ekspor barang atau jasa	- Membayar pajak	

Sumber : <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2015/12/diagram-interaksi-antar-pelaku-ekonomi.html> (Diakses : 17 Januari 2017)

Sebagian besar interaksi masyarakat antar kawasan konservasi perairan terjadi pada sektor perikanan tangkap dan sektor pariwisata. Bentuk interaksi yang terjadi pada sektor perikanan berupa jual beli produk perikanan seperti ikan kakap dan kerapu. Model hubungan pelaku ekonomi antar kawasan konservasi perairan berupa kegiatan ekonomi sederhana dan kegiatan ekonomi terbuka. Model hubungan kegiatan ekonomi sederhana terjadi di TWP Gili Matra, TWP Gili Sulat dan Lawang, TWP Teluk Bumbang, TPK Gili Balu dan Tatar Sepang, TPK Pulau Keramat, Bedil dan Temudong, sedangkan kegiatan ekonomi terbuka terjadi di TWP Gili Banta, SAP Teluk Cempi, TWP Pulau Liang dan Ngali, TP Lunyuk dan TWP Gita Nada.

Bentuk interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi perikanan berupa nelayan di sekitar kawasan konservasi TWP Gili Matra, TWP Gili Sulat dan Lawang, TWP Teluk Bumbang, TPK Gili Balu dan Tatar Sepang, TPK Pulau Keramat, Bedil dan Temudong melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar kawasan konservasi, kemudian hasil tangkapan akan dijual ke pengepul di sekitar kawasan, kemudian pengepul akan menjual ikan tersebut secara langsung ke masyarakat di sekitar dan di luar kawasan dan menjual ke pasar kecamatan atau kabupaten.

Nelayan di sekitar kawasan konservasi TWP Gili Banta, SAP Teluk Cempi, TWP Liang Ngali dan TPP Lunyuk melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar kawasan konservasi, kemudian hasil tangkapan akan dijual ke pengepul disekitar kawasan. Sebagian besar pengepul di sekitar kawasan konservasi akan menjual ikan tersebut ke pedagang (trader) yang berada di Labuhan Sumbawa dan pengepul lainnya menjual langsung ke Mataram dan Bali. Pedagang di Labuhan Sumbawa akan menjual ke pedagang lainnya sesuai dengan kualitas ikan (kualitas ekspor dan kualitas lokal). Kualitas ikan ekspor akan dijual ke Bali kemudian akan diekspor ke Hongkong, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, sedangkan kualitas ikan lokal akan dijual di pasar sekitar Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Mataram.

Nelayan di sekitar kawasan konservasi TWP Gita Nada melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar kawasan konservasi, kemudian hasil tangkapan akan didaratkan dan dijual ke pengepul di sekitar kawasan yang berada di Desa Sekotong Barat, Desa Pelangan dan Desa Batu Putih. Pengepul di sekitar kawasan konservasi akan menjual ikan tersebut ke pedagang (*trader*) yang berada di Gerung dan Mataram, kemudian akan dijual ke pedagang (*trader*) lainnya sesuai dengan kualitas ikan (ekspor dan lokal). Kualitas ikan ekspor akan dijual ke Bali kemudian diekspor ke beberapa negara tujuan, sedangkan kualitas ikan lokal akan dijual di pasar Mataram.



Gambar 8. Rute perdagangan kakap kerapu Pulau Lombok dan Sumbawa

Bentuk interaksi yang terjadi pada sektor pariwisata berupa penyediaan jasa wisata seperti jasa transportasi, akomodasi dan kegiatan wisata selam, snorkeling dan memancing. Model hubungan pelaku ekonomi antar kawasan konservasi perairan belum terjadi, sedangkan model hubungan pelaku ekonomi di dalam kawasan konservasi berupa kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah.

Model hubungan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah terjadi di TWP Gili Matra dan TWP Gita Nada. Bentuk interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi pariwisata berupa rumah tangga keluarga (pekerja wisata) mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai pemandu wisata,

pekerja di hotel dan restoran, pekerja di bidang transportasi (kapal, cidomo, sepeda), dan penjual souvenir, Perusahaan telah menghasilkan barang atau jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel, restoran, peralatan selam dan snorkeling, kapal, *speed boat*, memberikan sebagian keuntungan dan penghasilan kepada pekerja wisata, dan membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah telah melakukan pembangunan fasilitas publik (pelabuhan, jalan, listrik, dan air) dan menerima manfaat berupa pajak.

2.3.2 Jenis Sumber Daya Ikan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Antar KKP3K

Secara umum baik ikan pelagis maupun demersal ditangkap oleh nelayan di delapan KKP3K. Kapal atau armada yang digunakan di delapan KKP3K rata-sebagian besar kurang dari 10 GT atau masuk dalam kategori nelayan skala kecil. Alat tangkap yang umumnya dipakai adalah pancing (ulur) dan jaring insang, walaupun masih ditemukan praktek penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, racun, muroami, dan pukot hela dasar. Lama trip sebagian besar satu hari dan lokasi *fishing ground* masih berada di sekitar desa. Jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh nelayan di minimal dua atau lebih KKP3K ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat

No	Jenis Ikan			Gili Matra	Gita Nada	Gili Sulat Lawang	Teluk Bumbang	Lunyuk	Liang Ngali	Teluk Cempi	Gili Banta
	Nama Lokal	Common Name	Family/Species								
1	Balang-balang	Climbing gouramis	<i>Anabantidae</i>	√	-	√	√	-	-	-	-
2	Baronang	Spinefoot fish	<i>Siganus sp</i>	-	√	√	-	√	√	√	-
3	Barakuda	Barracuda	<i>Sphyaenidae</i>	-	-	√	-	-	-	-	√
4	Bawal laut	Pomfret	<i>Bramidae</i>	-	-	-	√	√	-	-	-
5	Belanak	Mullet	<i>Mugilidae</i>	-	√	-	-	-	√	√	-
6	Cakalang	Skipjack tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>	√	√	√	-	√	-	-	√
7	Cumi	Squid	<i>Loligo</i>	√	-	√	√	-	√	√	√
8	Ekor kuning	Fusilie	<i>Caesionidae</i>	-	-	-	-	√	√	√	√
9	Gurita	Octopus	<i>Octopoda</i>	√	√	√	-	√	-	-	√
10	Hiu	Shark	<i>Charcharidae</i>	-	√	√	√	√	-	-	√
11	Kakap	Snapper	<i>Lutjanidae</i>	-	√	√	√	√	√	√	√
12	Kapas	False trevallies	<i>Lactarius lactarius</i>	-	-	-	-	-	√	√	-
13	Kembung	Rastrelliger	<i>Scombridae</i>	-	√	√	√	√	√	√	√
14	Kepiting	Crab	<i>Scylla</i>	-	√	-	√	√	√	√	√
15	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelinae</i>	-	-	√	√	√	√	√	√
17	Ketambak	Emperor fish	<i>Lethrinus sp</i>	-	√	√	-	√	√	√	√
18	Ketombong	Rastrelliger	<i>Scombridae</i>	-	√	√	√	√	-	-	-
19	Kurisi (Bali)	Jobfish	<i>Pristipomoides sp</i>	-	-	√	-	√	√	√	√
20	Kuwe	Giant trevally	<i>Caranx sp</i>	-	-	-	√	-	√	√	-
21	Layang	Scads fish	<i>Decaferus sp</i>	-	√	√	-	-	√	√	√
22	Layur	Belfish	<i>Trichiurus lepturus</i>	-	-	-	√	-	-	-	√
23	Lobster	Lobster	<i>Nephropidae</i>	-	-	-	√	-	-	-	√

No	Jenis Ikan			Gili Matra	Gita Nada	Gili Sulat Lawang	Teluk Bumbang	Lunyük	Liang Ngali	Teluk Cempi	Gili Banta
	Nama Lokal	Common Name	Family/Species								
24	Pari	Rays	<i>Dasyatidae</i>	-	√	√	√	√	√	√	√
25	Pogot	Leather jacket fish	<i>Aluterus monoceros</i>	-	√	√	-	-	-	-	-
26	Selar	Yellowstripe scad	<i>Selaroides leptolepis</i>	-	-	-	√	√	√	√	-
27	Sunu	Grouper	<i>Seranidae</i>	-	-	-	-	-	√	√	-
28	Tembang	Sardines	<i>Sardinella</i>	-	√	-	√	-	√	√	√
29	Tengiri	Spanish mackerel	<i>Scombridae</i>	-	-	-	√	√	-	-	√
30	Teri	Anchovy	<i>Engraulidae</i>	-	-	√	√	-	√	√	√
31	Teripang	Sea cucumber	<i>Holothuroidea</i>	-	-	-	-	√	√	√	√
32	Tongkol	Mackerel tuna	<i>Euthynnus affinis</i>	-	-	√	√	√	√	√	√
33	Tuna	Tuna	<i>Thunnus spp</i>	-	-	√	-	√	-	-	√
34	Udang	Shrimp	<i>Caridea</i>	-	-	-	-	√	-	-	√

Sumber: Yulianto et al., 2017; Lestari et al., 2016a; Lestari et al., 2016b; Kartawijaya, et al., 2014a; Kartawijaya, et al., 2014b; Kartawijaya, et al., 2014c; Kartawijaya, et al., 2013; Kartawijaya, et al., 2012.

2.3.3 Jenis Jasa Lingkungan yang Dimanfaatkan oleh Pihak yang Berkepentingan Antar KKP3K

Pengembangan KKP3K sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu perangkat untuk mempertahankan jasa ekosistem yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah contoh jasa ekosistem dari KKP3K mencakup terpeliharanya keanekaragaman hayati, sumber pangan, regulasi iklim, pencegahan erosi dan abrasi, dan rekreasi (Remoundou et al., 2009).

Jasa ekosistem secara umum dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu (a) proses utama ekosistem, (b) manfaat proses ekosistem, dan (c) manfaat jasa ekosistem (TEEB, 2009). Sejumlah manfaat jasa ekosistem yang teridentifikasi dapat diberikan oleh KKP3K antara lain sumber ikan, bahan baku mentah (misal: garam), sumber energi (biofuel, gelombang), sumber obat-obatan, dan kesenangan (pariwisata, rekreasi, budaya). Berdasarkan hal tersebut, perlindungan habitat melalui KKP3K ataupun jejaring KKP3K akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat (Fletcher et al., 2011).

Dalam kajian ini, jasa ekosistem yang teridentifikasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan antar KKP3K adalah jasa ekosistem kesenangan (pariwisata). Dalam pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Provinsi NTB mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Tahun 2013 – 2028. Sejumlah KKP3K yang ada di Provinsi NTB merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) seperti (a) KSPD Senggigi-Tiga Gili yang mencakup daerah Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili (TWP Gili Matra), Sindang Gila, Senaru, dan Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olahraga bahari, dan budaya; (b) KSPD Alasutan yang meliputi kawasan Agrotamasa, Pulau Bedil (TPK Kabete), dan Pulau Bungin sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya, dan kuliner; (c) KSPD Sape-Pulau Sangiang meliputi kawasan wisata Sangiang, Pulau Ular, (TWP Gili Banta), Pulau Kelapa, Bajo Pulau, Pantai Papa sebagai wisata bahari, minat khusus, bawah laut, wisata alam, dan kuliner.

Selain melalui pengembangan DPD dan KSPD, salah satu yang juga potensi wisata yang makin berkembang adalah wisata *yacht*. Dalam pengelolaan wisata *yacht*, sejumlah titik di Provinsi NTB berfungsi sebagai gerbang masuk (*entry point*) maupun gerbang keluar (*exit point*). Gerbang masuk maupun keluar untuk *yacht* ini ada di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima (Priyono, 2014). Berdasarkan lokasi gerbang yang berada di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima,

maka interaksi ekonomi antar dua KKP3K yang berada di dua kabupaten tersebut, TWP Gili Matra dan TWP Gili Banta, sangat mungkin akan meningkat.

Selain TWP Gili Matra dan TWP Gili Banta, jalur wisata *yacht* juga melewati TWA Pulau Satonda dan TWAL Pulau Moyo. Letak Pulau Moyo strategis karena terletak di antara obyek wisata lain seperti Gili Matra (Lombok, TWA Pulau Satonda (Bima – Dompu) dan Taman Nasional Komodo (Dit KKJI, 2017).



Gambar 9. Peta pengembangan pembangunan ekonomi Bali – Nusa Tenggara

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan nilai ekonomis penting dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Akan tetapi jasa ekosistem yang disediakan oleh KKP3K perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), bersamaan dengan pengembangan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara sebagai roda ekonomi masyarakat, pembangunan kelautan harus juga meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional khususnya konservasi laut agar kelestariannya tetap terpelihara.

2.3.4 Jenis Kegiatan Produktif yang Dilakukan di dalam Kawasan yang Berjejaring

Salah satu sektor yang dapat dianggap memberikan nilai tambah relatif tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian adalah usaha kecil/mikro (UMK) yaitu di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sektor industri yang umumnya dijumpai di wilayah pedesaan adalah industri kecil (mikro) dan kerajinan rumah tangga. Salah satu usaha jasa yang paling menonjol adalah pariwisata. Jasa yang ditawarkan pun beragam mulai dari memandu diving/snorkeling, penginapan, rumah makan, penyewaan alat, spa/salon, yoga, dll. Beberapa usaha kecil mikro yang bisa ditemukan di lokasi kajian ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan produktif di lokasi kajian

No	Jenis Kegiatan Produktif	Lokasi
1	Pariwisata (jasa)	TWP Gili Matra, TWP Gita Nada, TWP Sulat Lawang, SAP Teluk Cempi, TWP Gili Balu, TWP Teluk Bumbang
2	Transportasi (jasa)	TP Penyu Lunyuk, TWP Gili Matra, TWP Gita Nada, TWP Sulat Lawang, TWP Gili Balu, TWP Teluk Bumbang
3	Pindang ikan	TWP Gita Nada, TWP Sulat-Lawang
4	Budidaya mutiara	TWP Teluk Bumbang, Liang Ngali
5	Pembuatan roti	TP Penyu Lunyuk, TWP Gili Matra

Sumber: Lestari et al., 2016a; Lestari et al., 2016b; Kartawijaya, et al., 2014a; Kartawijaya, et al., 2014b; Kartawijaya, et al., 2014c; Kartawijaya, et al., 2013; Kartawijaya, et al., 2012.

Pengembangan kegiatan produktif antar KKP3K akan tergantung kepada kebutuhan komunitas dan pertimbangan pengelolaan yang terintegrasi atau Integrated Coastal Management (ICM, dimana KKP3K dapat dirancang dan dikelola untuk mengakomodasi beragam tujuan dan kegiatan. Mengejar satu tujuan (misalnya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati atau produksi perikanan) tidak harus selalu berseberangan dengan upaya mengejar tujuan yang lain seperti menciptakan sumber pendapatan, pariwisata, atau manfaat sosial lainnya (White et al., 2006).

3. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari kajian sosial budaya ekonomi di sepuluh KKP3K yang ada di Provinsi NTB:

Profil demografi di delapan kawasan memiliki banyak kesamaan, diantaranya: (a) Multietnis; (b) Bahasa yang digunakan selain Bahasa Indonesia adalah Bahasa Sasak dan Bima; (c) Hampir semua responden berada pada rentang usia produktif; (d) Sebagian besar lulus Sekolah Dasar; (e) Ketergantungan terhadap sumber daya laut tinggi; (f) Kapasitas adaptasi nelayan rendah; (g) Memiliki keragaman mata pencaharian; (h) Nelayan merupakan profesi yang digeluti selama puluhan tahun; (i) Lebih dari separuh nelayan memiliki perahu sendiri; dan (j) Sebagian besar menggunakan satu alat tangkap.

Peraturan mengenai alat tangkap yang dilarang seperti bom, racun, pukut hela dasar, dll umumnya diketahui oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Mengenai spesies yang dilindungi, masyarakat mengenali penyu, lumba-lumba, hiu paus, dugong sebagai satwa yang dilarang ditangkap. Selain itu juga ada aturan terkait waktu, mengatur kapan nelayan (disarankan) tidak melaut dan aturan tentang lokasi dilarang menangkap ikan.

Sebaran pengetahuan tidak merata, secara umum dukungan masyarakat terhadap penetapan lokasi kajian menjadi kawasan konservasi cukup positif. Hal ini terlihat dari persentase tingkat dukungan yang berada di atas 50% di setiap lokasi kajian.

Potensi konflik dan ancaman yang terdapat di lokasi kajian dari aspek ekologi berupa: (a) praktek perikanan tangkap yang merusak karena menggunakan bom, racun, jaring yang merusak, dan panah/kompresor, (b) limbah padat dan cair dari aktivitas masyarakat pesisir, (c) kegiatan wisata bahari yang belum menerapkan konsep ekowisata, dan (d) pemanfaatan sumber daya pesisir yang dilindungi. Ancaman dari aspek sosial ekonomi berupa: (a) terbatasnya kapasitas nelayan; (b) monopoli harga; (c) kuatnya hubungan *patron-client* menyebabkan nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sedangkan ancaman aspek sosial budaya akan lebih kental di KKP3K yang kegiatan wisatanya berkembang pesat, seperti di TWP Gili Matra. Ancaman tersebut berupa: (a) perubahan norma sosial; (b) kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Secara umum kearifan lokal di lokasi kajian terkait sumber daya pesisir dan laut adalah upacara petik laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, racun, dan jaring, larangan menangkap beberapa jenis biota laut yang dilindungi seperti penyu, lumba-lumba, paus, hiu, dan ikan karang, larangan menebang pohon bakau, mengambil terumbu karang, dan adanya kesepakatan waktu khusus dimana nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Sebagian besar interaksi masyarakat antar kawasan konservasi perairan terjadi pada sektor perikanan tangkap dan sektor pariwisata. Bentuk interaksi yang terjadi pada sektor perikanan berupa jual beli produk perikanan seperti ikan kakap dan kerapu. Baik ikan pelagis maupun demersal ditangkap oleh nelayan di delapan KKP3K. Ada 34 jenis ikan yang dimanfaatkan oleh lebih dari 2 KKP3K. Kapal atau armada yang digunakan di delapan KKP3K sebagian besar kurang dari 10 GT atau masuk dalam kategori nelayan skala kecil.

Jasa ekosistem yang teridentifikasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan antar KKP3K adalah jasa ekosistem kesenangan (pariwisata). Sejumlah KKP3K yang ada di Provinsi NTB merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Sektor industri yang umumnya dijumpai di wilayah pedesaan adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Salah satu usaha jasa yang paling menonjol adalah pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, S. M., & Armitage, D. (2015). A Social Relational Network Perspective for MPA Science. *Conservation Letters*, 8: 1–13. doi:10.1111/conl.12090
- Aminollah, Hamdi, L., Ruspono, Mukmin, A., Kusbandono, Hilyana, S., Ariawan, I.M.D., Hernawati, Kartawijaya, T., Yulianto, I., Mihardja, A. T., Ardiyansyah, F., Sanofa, V. (2016). *Proses Harmonisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Wildlife Conservation Society.
- BPS NTB. (2013). *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2013*. Mataram
- Conservation, C., & Foundation, E. (n.d.). *Creating and Managing Marine Protected Areas in the Philippines*.
- Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). (2017). Diunduh dari: <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/24> pada tanggal 28 Januari 2017.
- Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). (2013). *Profil Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ini dia 7 unsur kebudayaan masyarakat Bima. (2017). Diunduh dari : <http://www.mistersosiologi.com/2015/03/7-unsur-kebudayaan-suku-bima-antropologi-sosiologi.html>. Tanggal 17 Januari 2017
- Fletcher, S., Saunders, J., and Herbert, R.J.H. (2011). *A Review of Ecosystem Services Provided by Broad-Scale Marine Habitat in England's MPA Network*. *Journal of Coastal Research* : 378 – 383. Poland.
- IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) (2008). *Establishing Marine Protected Area Networks—Making It Happen*. Washington, D.C.: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy.
- Kartawijaya, T., Anggraeni, R., Ngoniing, M., Ningtias, P., & Herdiana, Y. (2014a). *Aspek sosial-ekonomi dalam pengelolaan calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah Lunyuk, Kabupaten Sumbawa*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.
- Kartawijaya, T., Anggraeni, R., Hasbi, K.M., Ningtias, P., & Herdiana, H. (2014b). *Aspek Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Gili Sulat-Gili Lawang, Kabupaten Lombok Timur*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.
- Kartawijaya, T., Anggraeni, R., Rafandi, T., Ningtias, P., & Herdiana, Y. (2014c). *Aspek Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Gita Nada, Kabupaten Lombok Barat*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.

- Kartawijaya, T., Ningtias, P., Herdiana, Y., Tarigan, S. A., Mukminin, A., Anggraeni, R., & Hartini, M. (2013). *Laporan kajian Aspek sosial-ekonomi dalam pengelolaan taman wisata perairan teluk bumbang dan pengelolaan perikanan lobster lombok*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.
- Kartawijaya, T., Yulianto, I., Herdiana, Y., Prasetya, R., Anggraeni, R., Hasbi, K.M., Hazmi, H., & Fain, H. (2012). *Laporan monitoring sosial ekonomi dalam pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Meno dan Trawangan*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.
- Lestari, W.P., Yulistianti, A., Wulandari, A.T., Br Turnip., M.D., Bakhri, S., Firmansyah, S., & Jayadi, T. (2016a). *Laporan Survei Sosial Ekonomi SAP Teluk Cempi, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun 2016*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program
- Lestari, W.P., Yulistianti, A., Wulandari, A.T., Br Turnip., M.D., Bakhri, S., Firmansyah, S., & Jayadi, T. (2016b). *Laporan Survei Sosial Ekonomi TWP Liang Ngali, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Tahun 2016*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program
- Priyono, A. (2014). *Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Bahari*. Kongres Maritim Indonesia. Yogyakarta
- Remoundou, K., Koundori, p., Kontogianni, A., PALD, and Skourtos, M. (2009). Valuation of Natural Marine Ecosystem: An Economic Perspective . *Environmental Science and Policy*, 12: 1040-1051.
- Standards Association of Australia. (1999). *A basic introduction to managing risk : using the Australian and New Zealand Risk Management Standard AS/NZS 4360:1999*. Strathfield: Standards Association of Australia
- IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) (2008). *Establishing Marine Protected Area Networks—Making It Happen*. Washington, D.C.: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy.
- White, A.T., P.M. Aliño and A.T. Meneses. (2006). *Creating and managing marine protected areas in the Philippines*. Cebu: Fisheries Improved for Sustainable Harvest Project, Coastal Conservation and Education Foundation, Inc. and University of the Philippines Marine Science Institute.
- Yulianto, S.E., Lestari, W.P., Yulistianti, A., Wulandari, A.T., Br Turnip., M.D., Bakhri, S., Firmansyah, S., & Jayadi, T. (2017). *Laporan Survei Sosial Ekonomi TWP Gili Banta, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun 2017*. Bogor: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program

